



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARMEN GHANI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 98278

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.050.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/99 m2 di KAB / KOTA SOLOK, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	198.000.000
1. MOBIL, TERIOS X Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA SOUL 1KPA/P Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
3. MOTOR, VARIO NC110DCWAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
4. MOBIL, HONDA CRV SUV Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	55.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.300.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.304.300.000
III. HUTANG	Rp.	672.640.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	631.660.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ARMEN GHANI
NIK : 5312151405730001
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA BEKASI
Jabatan : HAKIM
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 1 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : **BPE-
14377/CT/KPP.3111/2026**

Tanggal : 27 Februari 2026

NPWP : 5312151405730001

Nama Wajib
Pajak : ARMEN GHANI

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi

Tahun Pajak : 2025

Masa Pajak : Januari - Desember 2025

Status SPT : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal
Terima SPT : 27 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.